



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

# RENJA

Perubahan  
2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia Nya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru ini disusun berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru di dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan oleh masing-masing komponen organisasi dapat berlangsung dalam proses sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang sama.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Renja Perubahan Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2024, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Banjarbaru, 2024  
Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kota Banjarbaru,



**ASEP SAPUTRA, S.Kom, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770909 200604 1 006

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1 LATAR BELAKANG.....	1
	1.2 LANDASAN HUKUM .....	2
	1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
	1.4 SISTEMATIKA RENJA – SKPD .....	3
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU TAHUN LALU .....	4
	2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022.....	4
	2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.....	16
	2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	21
	2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .....	23
	2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .....	31
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	35
	3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL .....	35
	3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD .....	36
	3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN .....	36
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	51
BAB V	PENUTUP .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perkembangan teknologi komunikasi informasi yang saat ini berkembang sangat pesat sehingga mengharuskan Pemerintah Kota Banjarbaru bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan atau sering disebut sebagai *e-government*. Tantangan besar dalam implementasi *e-government* terletak pada proses penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus fokus pada wawasan strategis di masa depan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi teknologi informasi di Kota Banjarbaru melalui perencanaan yang terukur dan akurat.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Penyusunan program kerja dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dilakukan untuk mendukung proses perencanaan daerah Kota Banjarbaru di tahun 2024 sebagai implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah dokumen rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun ke depan dengan berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anatar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

## 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Agar Rencana Kerja sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2024;
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perencanaan awal yang telah dituangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
3. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur, tertib administrasi, dan akuntabel.

#### **1.4 SISTEMATIKA RENJA – SKPD**

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB IV PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

#### DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2024 adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.

Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan II tahun 2024 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan renja perubahan tahun 2024;
- b. Pembangunan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Pada Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah melaksanakan 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan capaian kinerja keuangan sebagai berikut :

#### 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

##### 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

##### 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.

##### 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

##### 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

**5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**6) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

**2) PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

**1) Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
- d. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media.
- e. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

**3) PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**

**1) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

**2) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.
- c. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas.
- e. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

**4) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

**1) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
- b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral.

**5) PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

**1) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



2	16	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
2	16	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD</b>	<b>251,805,950</b>	<b>88,703,400</b>	<b>251,805,950</b>	<b>113,080,400</b>		<b>251,805,950</b>	<b>453,589,750</b>	180%
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	18,191,350	60,836,000	18,191,350	5,352,200	29%	18,191,350	84,379,550	463%
2	16	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	233,614.600	27,867,400	233,614.600	107,728,200	46%	233,614.600	369,210,200	158%
2	16	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>4,244,550,220</b>	<b>3,239,071,353</b>	<b>4,244,550,220</b>	<b>2,172,673,790</b>		<b>4,244,550,220</b>	<b>9,656,295,363</b>	227%
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	4,213,888,820	3,194,863,453	4,213,888,820	2,165,312,490	51%	4,213,888,820	9,574,064,763	227%
2	16	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	8,515,800	7,834,000	8,515,800	-	-	8,515,800	16,349,800	191%
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	22,145,600	36,373,900	22,145,600	7,361,300	33%	22,145,600	65,880,800	297%

2	16	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang mengimplementasikan hasil bimtek dan diklatnya</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah ASN yang telah mengikuti bimtek	-	-	-	-	-	-	-	-
2	16	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>	<b>574,837,900</b>	<b>278,745,150</b>	<b>574,837,900</b>	<b>214,085,908</b>		<b>574,837,900</b>	<b>1,067,668,958</b>	185%
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	23,008,500	33,956,000	23,008,500	7,631,000	33%	23,008,500	64,595,500	280%
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	120,513,000	101,182,500	120,513,000	36,413,950	30%	120,513,000	258,109,450	214%
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	36,190,400	55,959,000	36,190,400	12,859,000	35%	36,190,400	105,008,400	290%
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang tersedia	3,157,000	6,529,500	3,157,000	814,000	25%	3,157,000	10,500,500	332%
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	391,969,000	81,118,150	391,969,000	156,367,958	39%	391,969,000	629,455,108	160%
2	16	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan barang penunjang urusan pemerintah daerah yang dapat digunakan</b>	<b>167,551,200</b>	<b>314,327,000</b>	<b>167,551,200</b>	-		<b>167,551,200</b>	<b>481,878,200</b>	287%
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Lapoarn Barang Milik Daerah pada SKPD yang Tersusun sesuai Ketentuan	14,999,800		14,999,800	5,132,500	34%	14,999,800	20,132,300	134%
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	116,884,200	32,550,000	116,884,200	-	-	116,884,200	149,434,200	127%

2	16	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	50,667,000	281,777,000	50,667,000	-	-	50,667,000	332,444,000	656%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi</b>	<b>490,694,000</b>	<b>302,229,652</b>	<b>490,694,000</b>	<b>185,777,135</b>		<b>490,694,000</b>	<b>978,700,787</b>	199%
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat digunakan	242,400,000	217,129,652	242,400,000	106,987,801	44%	242,400,000	566,517,453	233%
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	248,294,000	85,100,000	248,294,000	78,789,334	31%	248,294,000	412,183,334	166%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>643,718,870</b>	<b>688,577,250</b>	<b>643,718,870</b>	<b>88,346,550</b>		<b>643,718,870</b>	<b>1,420,642,670</b>	220%
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	37,993,150	27,105,000	37,993,150	9,720,000	25%	37,993,150	74,818,150	196%
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	142,435,500	76,969,100	142,435,500	49,658,800	34%	142,435,500	269,063,400	188%
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	29,950,000	29,700,000	29,950,000	11,820,000	34%	29,950,000	71,470,000	238%

2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	373,375,000	465,600,000	373,375,000	-	0%	373,375,000	838,975,000	224%
2	16	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	59,965,220	89,203,150	59,965,220	17,147,750	28%	59,965,220	166,316,120	277%
<b>2</b>	<b>16</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>									
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Publik yang Dikelola dengan Baik	3,319,277,950	1,071,178,399	3,319,277,950	1,140,780,040		3,319,277,950	5,531,236,389	166%
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	53,321,700	86,362,000	53,321,700	13,778,150	25%	53,321,700	153,461,850	287%
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	275,808,900	334,755,199	275,808,900	5,842,240	2%	275,808,900	616,406,339	223%
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	44,079,000	51,317,000	44,079,000	21,923,850	49%	44,079,000	117,319,850	266%
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	2,321,105,300	-	2,321,105,300	988,465,800	42%	2,321,105,300	3,309,571,100	1425%
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	150,654,850	144,213,000	150,654,850	50,000,000	33%	150,654,850	344,867,850	288%

2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	474,308,200	454,531,200	474,308,200	60,770,000	12%	474,308,200	989,609,400	208%
2	16	03			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>									
2	16	03	2.01		<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SKPD yang Memperbaharui Data dan Informasi ke Dalam Domain dan Sub Domain</b>	1,609,881,820	4,794,704,770	1,609,881,820	188,006,525		1,609,881,820	6,592,593,115	409%
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota	84,994,550	51,549,000	84,994,550	8,476,325	9%	84,994,550	145,019,875	170%
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	1,524,887,270	4,743,155,770	1,524,887,270	179,530,200	11%	1,524,887,270	6,447,573,240	422%
2	16	03	2.02		<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SKPD yang Difasilitasi dalam Penerapan E-Government</b>	4,882,058,200	3,183,931,208	4,882,058,200	1,639,470,159		4,882,058,200	9,705,459,567	198%

2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	35,570,100	47,226,000	35,570,100	7,674,950	21%	35,570,100	90,471,050	254%
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	4,420,034,200	2,442,092,708	4,420,034,200	1,528,061,159	34%	4,420,034,200	8,390,188,067	189%
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	290,222,200	327,770,500	290,222,200	91,877,400	31%	290,222,200	709,870,100	244%
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	63,801,900	333,437,000	63,801,900	4,618,050	7%	63,801,900	401,856,950	629%
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	72,429,800	33,405,000	72,429,800	7,238,600	9%	72,429,800	113,073,400	156%
2	20				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>									
2	20	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>									
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah	Prosentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate dan	190,185,950	111,181,500	190,185,950	56,228,250		190,185,950	357,595,700	188%

					Kabupaten/Kota	Terverifikasi								
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	128,388,650	30,660,500	128,388,650	31,145,150	24%	128,388,650	190,194,300	148%
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	-	-	-	-		-		
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah dokumen metadata statistik yang dilaksanakan	61,797,300	80,521,000	61,797,300	25,083,100	40%	61,797,300	167,401,400	270%
2	21				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>									
2	21	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>									
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SKPD yang Menerima Layanan Keamanan Informasi	195,759,700	6,133,500	195,759,700	60,310,400		195,759,700	262,203,600	133%

					Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		195,759,700		195,759,700	60,310,400	30%	195,759,700	262,203,600	133%
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditetapkan								
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik		-						

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada tahun anggaran 2024 sampai triwulan II telah mencapai target keluaran yang diharapkan dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran di atas 42,75% (empat puluh dua koma tujuh puluh lima). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan dana sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024 sudah sesuai dengan target pada triwulan II. Alokasi anggaran belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru pada Tahun 2024 sebesar **Rp. 14.028.825.454,-** (empat belas milyar dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 sebesar **Rp. 6.019.755.761,-** (enam milyar Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Tabel 2.2  
 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika  
 Kota Banjarbaru

No.	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	5 dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 laporan	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	36 orang	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	12 laporan	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah</b>									
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	4 paket	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	8 paket	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 jenis / 25000 lembar	6 jenis / 25000 lembar	6 jenis / 25000 lembar	6 jenis / 25000 lembar	6 jenis / 25000 lembar	6 jenis / 25000 lembar	6 jenis / 25000 lembar	2 paket	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	2 eks	2 eks	2 eks	2 eks	2 eks	2 eks	2 eks	1 dokumen	

5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	30 laporan							
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 gedung	1 unit							
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	1 unit							
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	2 laporan							
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 orang	12 laporan							
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit								
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 unit	13 unit							
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3 unit	9 unit							
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	2 paket							
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 paket	5 paket							
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>									
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 kali	2 kali	1 dokumen	1 dokumen	2 kali	2 kali	1 dokumen	1 dokumen	
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 kali	12 kali	1 dokumen	1 dokumen	12 kali	12 kali	1 dokumen	1 dokumen	
3	Pelayanan Informasi Publik	2 kali	2 kali	1 dokumen	1 dokumen	2 kali	2 kali	1 dokumen	1 dokumen	
4	Layanan Hubungan Media	12 bulan	12 bulan	5 layanan	5 layanan	12 bulan	12 bulan	5 layanan	5 layanan	

5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	80 orang	
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 dokumen	
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>									
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4 kali	4 kali	1 dokumen	1 dokumen	4 kali	4 kali	1 dokumen	1 dokumen	
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 unit kerja	4 unit kerja	4 unit kerja	4 unit kerja	4 unit kerja	4 unit kerja	4 unit kerja	1 unit	
	<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 kali	1 kali	1 dokumen	1 dokumen	1 kali	1 kali	1 dokumen	1 dokumen	
2	Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintahan Daerah	70%	70,5%	71%	71,5%	70%	70,5%	71%	1 unit	
3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	3 aplikasi	3 unit	
4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2 kali	2 kali	1 dokumen	1 dokumen	2 kali	2 kali	1 dokumen	1 dokumen	
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	64 orang	64 orang	1 dokumen	1 dokumen	64 orang	64 orang	1 dokumen	1 dokumen	
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>									
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	140 jenis data	140 jenis data	1 dokumen	1 dokumen	140 jenis data	140 jenis data	1 dokumen	1 dokumen	
2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>									
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1	Penyediaan Layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	3 kebijakan	2 kebijakan	1 dokumen	1 dokumen	3 kebijakan	2 kebijakan	1 dokumen	4 perangkat daerah	

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Isu-isu penting yang menjadi masalah mendesak dan harus dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan konektivitas jaringan internet dan intranet antar SKPD

Salah satu tugas terbesar Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini adalah mewujudkan Banjarbaru *smart city* melalui pemanfaatan TIK. Hal tersebut harus didukung dengan jaringan yang saling terintegrasi antar SKPD.

2. Tuntutan Publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang serta berani untuk menyampaikan pendapat, dan terus berupaya mencari informasi yang relevan dengan kondisi yang sedang dihadapinya.

3. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak dibarengi dengan pemenuhan sarana prasarana di bidang komunikasi dan Informasi.

Perkembangan ilmu teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bias dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Apabila tidak diantisipasi secara cepat tentu akan membawa ekses yang kurang baik bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kompeten yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumber daya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap SKPD di Kota Banjarbaru.

Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh SKPD Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kota Banjarbaru. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi

Informasi di Kota Banjarbaru. Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan prasarana yang belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala. Hal – hal tersebut merupakan tantangan bagi pengembangan TI di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT di Kota Banjarbaru. Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Bidang komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dari sisi internal antara lain: tersedianya Sumber Daya Manusia, tersedianya anggaran dan sarana prasarana, tersedianya tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK. Dari sisi eksternal peluang yang dimiliki antara lain kepedulian pimpinan terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun isu-isu strategisnya antara lain adalah:

1. Penyelenggaraan good governance;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik;
3. Penataan dan pengembangan telekomunikasi;
4. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik dan mencerahkan masyarakat.

Tabel 2.4  
 Review Terhadap Renja Perubahan Tahun 2024  
 Kota Banjarbaru

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp. 000)
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 dokumen	Rp 10.174.350	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 dokumen	Rp 18.191.350
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	1 dokumen	Rp. 212.014.900	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 Laporan	Rp 233.614.600.

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan</b>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	1 tahun	Rp 4.104.514.334	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	36 Orang	Rp 4.213.888.820
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 laporan	Rp 8.515.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 laporan	Rp 8.515.800
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	3 laporan	Rp 22,145,600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	12 laporan	Rp 22,145,600
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	4 laporan	Rp 14.999.800	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah SKPD	4 laporan	Rp 14.999.800
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>		
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 paket	Rp 19.983.500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 paket	Rp 23.008.500
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	4 paket	Rp 119.763.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8 paket	Rp 120.513.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 paket	Rp 36.190.400	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	2 paket	Rp 36.190.400

4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang tersedia	2 eks	Rp 1.996.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah paket bahan bacaan atau buku peraturan yang disediakan	1 dokumen	Rp 3.157.000
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	12 laporan	Rp 280.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	Rp 391.969.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan</b>		
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	1 gedung	Rp 116.884.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit	Rp 116.884.200
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	1 paket	Rp 50,667,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	1 unit	Rp 50,667,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi</b>		
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat digunakan	3 jenis	Rp 224.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	2 laporan	Rp 242.400.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 247.429.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	Rp 247.429.200

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	1 unit	Rp 37.993.150	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	Rp 37.993.150
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	12 unit	Rp 142.435.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinan	13 unit	Rp 142.435.500
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 unit	Rp 29.950.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	Rp 29.950.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang terpelihara/direhabilitasi	2 paket	Rp 373.375.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	1 paket	Rp 59.965.220	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	Rp 59.965.220
	<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				

	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Layanan Informasi Publik yang Dikelola dengan Baik</b>			<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Layanan Informasi Publik yang Dikelola dengan Baik</b>		
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1 dokumen	Rp 53.321.700	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1 dokumen	Rp 53.321.700
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1 dokumen	Rp 43.808.900	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1 dokumen	Rp 275.308.900
3	Pelayanan Informasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 dokumen	Rp 44.079.000	Pelayanan Informasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 dokumen	Rp 44.079.000
4	Layanan Hubungan Media	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah layanan hubungan media	5 layanan	Rp 2.321.105.300	Layanan Hubungan Media	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah layanan hubungan media	5 layanan	Rp 2.321.105.300
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	80 orang	Rp 150.654.850	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	80 orang	Rp 150.654.850
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	12 kali	Rp 222.306.200	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	12 dokumen	Rp 474.308.200
	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>					<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>				

	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase SKPD yang Memperbaharui Data dan Informasi ke Dalam Domain dan Sub Domain</b>			<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase SKPD yang Memperbaharui Data dan Informasi ke Dalam Domain dan Sub Domain</b>		
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota	1 dokumen	Rp 19.898.550	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota	1 dokumen	Rp 84.998.550
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	4 unit kerja	Rp 728.187.400	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	1 unit	Rp 1.524.887.270
	<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase SKPD yang Difasilitasi dalam Penerapan E-Government</b>			<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase SKPD yang Difasilitasi dalam Penerapan E-Government</b>		
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	Rp 35.570.100	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 dokumen	Rp 35.570.100
2	Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang terkelola	1 unit	Rp 4.066.039.600	Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang terkelola	1 unit	Rp 4.420.034.200
3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	3 aplikasi	Rp 270.222.200	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	3 unit	Rp 290,022,500

4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	1 dokumen	Rp 33.801.900	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	1 dokumen	Rp 63.801.900
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1 dokumen	Rp 72.429.800	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1 dokumen	Rp 72.429.800
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate dan Terverifikasi</b>			<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate dan Terverifikasi</b>		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dokumen	Rp 88.388.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dokumen	Rp 128.388.650
2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen metadata statistik yang dilaksanakan	1 dokumen	Rp 61.797.300	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen metadata statistik yang dihimpun	1 dokumen	Rp 61.797.300
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				

	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SKPD yang Menerima Layanan Keamanan Informasi			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SKPD yang Menerima Layanan Keamanan Informasi		
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	4 perangkat daerah	Rp 195.759.700	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	4 perangkat daerah	Rp 195.759.700

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Diskominfo hanya sebagai SKPD pendukung, yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar. Program / Kegiatan yang diusulkan tersebut dikaitkan dengan isu - isu yang menjadi masalah mendesak dan harus dihadapi oleh Diskominfo dalam rangka menjalankan tupoksi yaitu :

- a) Penyelenggaraan konektivitas jaringan internet dan intranet antar SKPD.
- b) Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.
- c) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi tidak dibarengi dengan pemenuhan sarana prasarana di bidang komunikasi dan informasi.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Kota Banjarbaru Tahun 2023

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>				
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan evaluasi kinerja SKPD</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	5 dokumen	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	2 laporan	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan</b>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	36 Orang	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun diakhir tahun sesuai ketentuan	1 laporan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	12 laporan	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		

1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan rekonsiliasi yang tersedia	1 laporan
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi</b>	
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	4 paket
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	8 paket
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang disediakan	1 dokumen
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dapat Digunakan</b>	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	1 unit
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 unit
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah yang difasilitasi</b>	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan penyediaan dan komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	2 laporan
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas perorangan//dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	13 unit
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang	2 paket

			terpelihara/direhabilitasi	
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit
<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>				
<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Persentase Layanan Informasi Publik yang Dikelola dengan Baik</b>	
1	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	1 dokumen
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1 dokumen
3	Pelayanan Informasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	1 dokumen
4	Layanan Hubungan Media	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah layanan hubungan media	5 layanan
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	80 orang
6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	12 dokumen
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>				
<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Persentase SKPD yang Memperbaharui Data dan Informasi ke Dalam Domain dan Sub Domain</b>	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota	1 dokumen
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	1 unit
<b>Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Persentase SKPD yang Difasilitasi dalam Penerapan E-Government</b>	
1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1 dokumen
2	Penyelenggaraan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	1 unit

3	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	3 unit
4	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan <i>Masterplan Smart City</i>	1 dokumen
5	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1 dokumen
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>				
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>				
<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Prosentase Data Statistik Sektoral yang Terupdate dan Terverifikasi</b>	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	1 dokumen
2	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah dokumen metadata statistik yang dilaksanakan	1 dokumen
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>				
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>				
<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Persentase SKPD yang Menerima Layanan Keamanan Informasi</b>	
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan	4 perangkat daerah

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah : Penciptaan layanan informasi dan komunikasi yang efisien dan modern untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (knowledge based society), Pengembangan e-Procurement, Pengembangan dan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan e-government. Sebagai Leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, kementerian Komunikasi dan Informatika dalam renstra tahun 2021-2026 akan berfokus membangun sektor komunikasi, tata kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi dan Government Publik Relation.

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, diarahkan pada perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing di tingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi inter operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, siaran radio, surat kabar/majalah, media tradisional, internet, dan media komunikasi dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannya.

Misi Kota Banjarbaru yang menjadi tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yaitu **“Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas layanan informasi publik, Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)”**.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan lingkungan.
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan di bidang Statistik dan

Persandian. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan dalam pencapaian visi Kepala Daerah melalui misi keempat.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terpilih Tahun 2021-2026 dan sesuai dengan *tag line* Kota Banjarbaru Tahun 2021 yaitu “Banjarbaru JUARA”, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yang sesuai dengan tupoksinya sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Statistik dan Persandian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yang mengacu pada cascading, Renstra dan RPJMD adalah :

1. Meningkatnya kualitas layanan public
2. Meningkatnya informasi publik
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.
4. Meningkatnya ualitas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah :

- a. Meningkatnya penggunaan domain dan sub domain.
- b. Meningkatnya Meningkatkan Pelaksanaan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah.
- c. Mewujudkan pengelolaan layanan informasi publik.
- d. Meningkatnya data statistik sektoral daerah.
- e. Meningkatnya layanan keamanan informasi.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 disusun dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru sesuai dengan RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah merumuskan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) sub kegiatan, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan serta Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Dengan berubahnya struktur organisasi Bidang Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika maka Dinas Komunikasi dan

Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Urusan Persandian. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2024 adalah sebagai berikut :

## **1. Urusan Sekretariat**

### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

#### **1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

##### **1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 18.191.350,- (Delapan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksanan penyusunan perencanaan pembangunan SKPD.

##### **2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 233.614.600,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja pembangunan SKPD.

#### **2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

##### **1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.213.888.820,- (Empat Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapab Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.515.800,- (Delapan Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya penyusunan laporan keuangan tahunan.

##### **2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 22.145.600,- (Dua Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya monitoring capaian kinerja keuangan SKPD.

#### **3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

##### **1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.999.800,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)

dengan keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

#### **4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

##### **1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.008.500,- (Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan.

##### **2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 120.513.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik kantor.

##### **3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 36.190.400,- (Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya penyediaan pengadaan dan cetakan.

##### **4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.157.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan keluaran Terlaksananya penyediaan Bahan Bacaan atau Buku.

##### **5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya perjalanan dinas.

#### **5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

##### **1) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 116.884.200,- (Seratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan.

##### **2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp 50.667.000,- (Lima Puluh Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan.

#### **6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

##### **a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 242.400.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 247.429.200,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya penyediaan pegawai administrasi kantor non ASN.

**7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 37.993.150,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 142.435.500,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 29.950.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp 373.375.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan.

5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 59.965.200,- (Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **2. Urusan Bidang Komunikasi**

### **a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

#### **a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

1) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik

Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 53.321.700,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi.

2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas  
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp 474.308.200,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tigas Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunikasi.

3) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 44.079.000,- (Empat Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya pelayanan informasi publik.

4) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 150.654.850,- (Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik.

5) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp 275.808.900,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik selama 12 (dua belas) bulan.

6) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.321.105.300,- (Dua Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Seratus Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Layanan Hubungan Media.

## **3. Urusan Bidang Informatika**

### **a. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

#### **a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 84.998.550,- (Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.524.887.270,- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

**b) Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp 35.570.100,- (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah  
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.420.034,200,- (Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah.
- 3) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 290.222.200,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 4) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas  
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 63.801.900,- (Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City.

- 5) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp 72.429.800,- (Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

#### **4. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik**

##### **a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

###### **a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 128.388.650,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

- 2) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 61.797.300,- (Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Terbangunnya Metadata Statistik Sektoral.

#### **5. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian**

##### **a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

###### **a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 195.759.700,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota.

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD**  
**Tahun 2024 dan Rencana Tahun 2024 Perubahan**

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Rencana Tahun 2024 Perubahan		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	Sumber dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>										
<b>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>						
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>						
16	01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	5 dokumen	Rp 10,174,350	APBD		5 dokumen	Rp 18.191.350
16	01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	2 laporan	Rp 212.014.900	APBD		2 laporan	Rp 233.614.600

					<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>						
16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	36 Orang	Rp 4.104.514.334	APBD		36 Orang	Rp 4.213.888.820	
16	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 laporan	Rp 8,515,800	APBD		1 laporan	Rp 8,515,800	
16	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	12 laporan	Rp 22,145,450	APBD		12 laporan	Rp 22,145,450	
					<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>						
16	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan laporan barang milik daerah SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	4 laporan	Rp 14.999.800	APBD		4 laporan	Rp 14.999.800	
					<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
16	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	2 paket	Rp 19,983,500	APBD		4 paket	Rp 23.008.500	
16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	4 paket	Rp 119,763,500	APBD		8 paket	Rp 120.513.000	

16	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	2 paket	Rp 36,190,400	APBD		2 paket	Rp 36,190,400
16	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang tersedia	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	2 dokumen	Rp 1,996,500	APBD		1 dokumen	Rp 3.157.000
16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	30 laporan	Rp 280,000,000	APBD		30 laporan	Rp 391.969.000
					<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>					
16	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibeli	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 unit	Rp 50,923,000	APBD		1 unit	Rp 116,884,200
16	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terbangun	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 unit	Rp 19,551,000	APBD		1 unit	Rp 50,667,000
					<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>					
16	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan/jabatan yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 unit	Rp 37,993,150	APBD		1 unit	Rp 37,993,150

16	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	13 unit	Rp 142,435,500	APBD		13 unit	Rp 142,435,500
16	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	9 unit	Rp 29,950,000	APBD		9 unit	Rp 29,950,000
16	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	2 paket	Rp 59,965,220	APBD		2 paket	Rp 373,375,000
16	01	2	09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor /bangunan lainnya yang dipelihara	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 unit	Rp 19,551,000	APBD		5 unit	Rp 59,965,220
16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan lainnya yang dapat digunakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	3 laporan	Rp 224,400,000	APBD		3 laporan	Rp 242,400,000
16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	12 laporan	Rp 247,429,200	APBD		12 laporan	Rp 248,294,000
					<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Informasi Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>					
					<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentasi layanan informasi publik</b>		<b>2.880 orang</b>					
16	02	2	01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 53,321,700	APBD		1 dokumen	Rp 53,321,700

16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 43,808,900	APBD		1 dokumen	Rp 275,808,900
16	02	2	01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 44,079,000	APBD		1 dokumen	Rp 44,079,000
16	02	2	01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	5 layanan	Rp 2,321,105,300	APBD		5 layanan	Rp 2,321,105,300
16	02	2	01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	80 orang	Rp 150,654,850	APBD		80 orang	Rp 150,654,850
16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	12 dokumen	Rp 222,306,200	APBD		12 dokumen	Rp 474,308,200
					<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Nilai Aspek SPBE</b>		<b>80%</b>					
					<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SKPD yang memperbaharui data dan informasi ke dalam domain dan sub domain</b>		<b>80%</b>					
16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 19,898,550	APBD		1 dokumen	Rp 84,998,550



16	03	2	02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 72,429,800	APBD		1 dokumen	Rp 72,429,800
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>70%</b>					
					<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral yang diverifikasi</b>		<b>1 dokumen</b>					
20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 88,388,700	APBD		1 dokumen	Rp 128,388,650
20	02	2	01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 61,797,300	APBD		1 dokumen	Rp 61,797,300
					<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Persentase Tingkat Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>		<b>30%</b>					

					<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SKPD yang menerima layanan keamanan informasi</b>		<b>86%</b>					
21	02	2	01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	4 perangkat daerah	Rp 195,759,700	APBD		4 perangkat daerah	Rp 195,759,700

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024 Perubahan						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana				
1	2	3	4	5	6				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
		<b>Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>					
16	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan dan komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	2 laporan	Rp 242,400,000
16	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	12 laporan	Rp 248,294,000
		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
16	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan paket perlengkapan kantor yang disediakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	4 paket	Rp 23,008,500
16	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	8 paket	Rp 120,513,000
16	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan atau buku peraturan yang disediakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 3,157,000
16	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	30laporan	Rp 391,969,000
		<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>100%</b>	
16	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 unit	Rp 116,884,200

16	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 unit	Rp 50,667,000
					<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	
16	01	2	09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang direhabilitasi	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	2 unit	Rp 373,375,000
					<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	
16	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	5 dokumen	Rp 18,191,350
16	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	2 laporan	Rp 233,614,600
					<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	
16	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	36 orang	Rp 4,213,888,820
					<b>PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase Informasi Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>	
					<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase layanan informasi publik</b>		<b>2.880 orang</b>	
16	02	2	01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 275,808,900
16	02	2	01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	12 dokumen	Rp 474,308,200

					<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Nilai Aspek SPBE</b>		<b>80%</b>	
					<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SKPD yang memperbaharui data dan informasi ke dalam domain dan sub domain</b>		<b>80%</b>	
16	03	2	01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 84,998,550
16	03	2	01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan intra pemerintah daerah	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	4 unit	Rp 1,524,887,270
					<b>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase SKPD Difasilitasi dalam penerapan E-Government</b>		<b>80%</b>	
16	03	2	02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang terkelola	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 unit	Rp 4,420,034,200
16	03	2	02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	3 unit	Rp 290,222,200
16	03	2	02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inivasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 63,801,900
					<b>PROGRAM PENYELENGGA RAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>70%</b>	
					<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah data statistik sektoral yang diverifikasi</b>		<b>1 dokumen</b>	

20	02	2	01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Kantor Dinas Kominfo Kota Banjarbaru	1 dokumen	Rp 128,388,650
----	----	---	----	----	--	---	--------------------------------------	-----------	----------------

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

Oleh sebab itu, betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.

Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Banjarbaru, 2024  
**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kota Banjarbaru,**

**ASEP SAPUTRA, S.Kom, MM**  
Pembina  
NIP. 19770909 200604 1 006